

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume 5 Nomor 2 April 2026

ANALISIS KONDISI KEUANGAN KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Laelisneni¹⁾; Lily Karlina Nasution²⁾; Mayang Murni^{3*)}; Agustina Nurul Fajriah⁴⁾; Nurlela⁵⁾

- 1) Program Studi Akuntansi, Politeknik LP3I Medan
email: laelisneni@plm.ac.id
- 2) Program Studi Akuntansi, Politeknik LP3I Medan
email: lilykarlinanasution@gmail.com
- 3*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra
email: mayang.unsam@gmail.com
- 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra
email: agustina@unsam.ac.id
- 5) Program Studi Akuntansi, Politeknik Ganesha Medan
email: nurlela14juni@gmail.com

*Corresponding email: mayang.unsam@gmail.com

Abstract

Regional finance is a fundamental aspect in supporting economic development and improving the welfare of the community in a region. The management of regional finances reflects the ability of local governments to plan, implement, and account for all financial activities efficiently and transparently. The aim of this study is to analyze the financial condition of regencies and cities in the Aceh Province. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data sourced from reports of the Regional Finance and Asset Agency (BPKA) of North Sumatra Province and the Central Statistics Agency (BPS). The indicators used to assess financial conditions are service solvency, financial flexibility. The research found that the financial condition of regencies and cities in North Sumatra Province shows that only one regency/city, Asahan, has a poor financial condition. Meanwhile, 14 regencies/cities have a moderate financial condition. The good category is held by 4 regencies/cities (Medan, West Pakpak, Pematang Siantar, and Sibolga). This study can serve as a policy recommendation for improving financial management in regencies/cities in North Sumatra Province.

Keyword: Financial Condition; Service Solvency; Financial Flexibility; Financial Independence; North Sumatra Province

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Menurut Halim (2014), pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan secara efisien dan transparan. Keuangan daerah berperan dalam mendukung Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat suatu provinsi. Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan Langkah strategis bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan cara memperkuat basis perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kemandirian wilayah. (Indonesia, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, 2004).

Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi nyata dari kebijakan otonomi daerah (Indonesia, 2014). Kebijakan ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pengelolaan sumber daya keuangannya (Soleh, 2019). Implikasinya, setiap daerah dituntut untuk melakukan kontrol dan monitoring secara berkelanjutan terhadap kondisi keuangan mereka, agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya, namun ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, menjadi tantangan dalam hal mengelola Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan efisiensi belanja daerah (Kurniawan, 2019). Sumatera Utara sebagai provinsi terbesar di Pulau Sumatra memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun menghadapi tantangan dalam hal distribusi pendapatan dan ketergantungan pada sektor tertentu (SM, 2020). Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Sumatra, terutama melalui sektor industri dan perkebunan (RI), (2023). Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Utara yakni dalam hal pemerataan pemerataan dan diversifikasi ekonomi (Nasution, 2022).

Kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi cerminan akan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan layanan public yang baik bagi masyarakatnya, begitupula sebaliknya. Oleh karenanya pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan suatu daerah harus memperhatikan dan menjaga kondisi keuangan daerahnya dengan baik agar kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat dipertahankan atau ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya diperlukan Langkah komprehensif dalam menilai kondisi keuangan suatu daerah. Terdapat beberapa indicator dalam melihat kondisi keuangan suatu daerah berkualitas atau tidak, diantaranya solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan dan kemandirian keuangan. Dimana solvabilitas layanan digunakan untuk mengukur kemampuan memberikan layanan sesuai standar dan keinginan Masyarakat, fleksibilitas keuangan yang mengukur kemampuan pemda dalam mengantisipasi kejadian tak terduga dan kemandirian keuangan yang mengukur kemampuan dalam mengeksekusi keuangan secara efektif dan efisien. Maka berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dalam penelitian ini yakni menilai dan menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan indicator solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan dan kemandirian keuangan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif yakni desain penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) (Sugiyono, 219 C.E.). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual dan terperinci mengenai kondisi keuangan di Kabupaten Kota dalam Provinsi Aceh yang selanjutnya akan di analisis dan evaluasi hubungan keterkaitan antar fenomena yang terjadi.

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang bersumber dari data skunder yakni Laporan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik untuk melihat ketiga dimensi kondisi keuangan. Ketiga dimensi yang dimaksud ialah fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan dan kemandirian keuangan

Tabel 1. Variabel dan Indikator

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1	Kemandirian Keuangan	Mengukur kemampuan memberikan layanan sesuai standar dan keinginan Masyarakat	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
2	Fleksibilitas Keuangan	Mengukur kemampuan pemda dalam mengantisipasi kejadian tak terduga	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai}}$
3	Solvabilitas Layanan	Mengukur kemampuan dalam mengeksekusi keuangan secara efektif dan efisien.	$\frac{\text{Jumlah Aset tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Sumber : Permendagri No 19 Tahun 2020

Analisis data dalam penelitian ini terbagi atas beberapa tahapan diantaranya (1) menentukan kelompok *benchmark* pemerintah daerah yang setara, (2) menghitung indeks indicator dan indeks dimensi, (3) menghitung kondisi keuangan pemerintah daerah, (4) pemeringkatan dan pengkategorian kondisi keuangan, dan (5) deskripsi kondisi keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota, yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 28 karena 5 kabupaten/kota tidak ditemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Perhitungan indek rasio untuk dimensi keuangan yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Indek Rasio Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota	Indek Rasio Solvabilitas Layanan		Indeks Rasio Kemandirian		Indeks Rasio Fleksibilitas	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Nias	0,31	0,69	0,73	0,77	0,22	0,26
2	Mandailing Natal	0,04	0,03	0,63	0,67	0,11	0,14
3	Tapanuli Selatan	0,35	0,42	1,00	0,92	0,17	0,21
4	Tapanuli Tengah	0,10	0,10	0,52	0,62	0,12	0,12
5	Tapanuli Utara	0,35	0,34	0,34	0,38	0,24	0,20
6	Toba Samosir	0,36	0,51	0,67	0,74	0,14	0,15

7	Labuhan Batu	0,13	0,13	0,52	0,55	0,33	0,32
8	Asahan	0,10	0,10	0,00	0,00	0,20	0,19
9	Dairi	0,17	0,17	0,58	0,66	0,14	0,14
10	Karo	0,18	0,18	0,57	0,65	0,15	0,14
11	Deli Serdang	0,05	0,04	0,71	0,73	0,67	0,63
12	Nias Selatan	0,16	0,11	0,89	1,00	0,01	0,00
13	Humbang Hasundutan	0,52	0,50	0,57	0,66	0,13	0,13
14	Pakpak Bharat	1,00	1,00	0,67	0,76	0,05	0,05
15	Samosir	0,64	0,64	0,66	0,33	0,16	0,26
16	Serdang Bedagai	0,00	0,00	0,48	0,60	0,15	0,18
17	Padang Lawas Utara	0,16	0,11	0,51	0,62	0,06	0,06
18	Padang Lawas	0,18	0,16	0,70	0,78	0,07	0,06
19	Labuhan Batu Utara	0,05	0,08	0,61	0,67	0,09	0,09
20	Nias Utara	0,55	0,85	0,52	0,62	0,00	0,00
21	Kota Sibolga	0,95	0,94	0,45	0,51	0,30	0,31
22	Kota Tanjung Balai	0,29	0,25	0,55	0,60	0,18	0,24
23	Kota Pematang Siantar	0,84	0,83	0,54	0,62	0,38	0,32
24	Kota Tebing Tinggi	0,42	0,40	0,50	0,35	0,30	0,30
25	Kota Medan	0,84	0,77	0,81	0,79	1,00	1,00
26	Kota Binjai	0,07	0,07	0,42	0,45	0,27	0,26
27	Kota Padangsidimpuan	0,12	0,12	0,57	0,66	0,16	0,15
28	Kota Gunungsitoli	0,77	0,80	0,80	0,77	0,05	0,05

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indek rasio solvabilitas yang terbaik adalah kabupaten Pakpak Bharat, sedangkan yang terendah kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahun 2022 indek rasio kemandirian terbaik adalah kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Asahan. Tahun 2023 kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang memiliki nilai kemandirian terbaik, kabupaten Asahan tetap menjadi daerah yang terendahan rasio kemandiriannya. Indek rasio fleksibilitas terbaik diraih kota Medan baik untuk tahun 2022 maupun 2023. Nilai terendah pada tahun 2022 adalah Nias Utara. Nias Utara tetap menjadi daerah yang nilai fleksibilitasnya terendah di tahun 2023. Selain itu nilai terendah juga diraih oleh kabupaten Nias Selatan.

Setelah mendapatkan indek rasio dari ketiga dimensi keuangan yang diteliti, maka dilakukan perhitungan Indek Komposit Keuangan (IKK). Selanjutnya dilakukan perankingan dan kategori kondisi keuangan semua kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian. Secara hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 3. Ranking dan Kategori Indek Komposit Keuangan (IKK) Provinsis Sumut

No.	Kabupaten/Kota	Indek Komposit Keuangan (IKK)	Kategori
1	Kota Medan	0.87	Baik
2	Pakpak Bharat	0.59	Baik

3	Kota Pematang Siantar	0.59	Baik
4	Kota Sibolga	0.58	Baik
5	Kota Gunungsitoli	0.54	Cukup
6	Tapanuli Selatan	0.51	Cukup
7	Nias	0.5	Cukup
8	Deli Serdang	0.47	Cukup
9	Samosir	0.45	Cukup
10	Toba Samosir	0.43	Cukup
11	Humbang Hasundutan	0.42	Cukup
12	Nias Utara	0.42	Cukup
13	Kota Tebing Tinggi	0.38	Cukup
14	Nias Selatan	0.36	Cukup
15	Kota Tanjung Balai	0.35	Cukup
16	Labuhan Batu	0.33	Cukup
17	Padang Lawas	0.33	Cukup
18	Tapanuli Utara	0.31	Cukup
19	Dairi	0.31	Cukup
20	Karo	0.31	Cukup
21	Kota Padangsidimpuan	0.3	Cukup
22	Mandailing Natal	0.27	Cukup
23	Labuhan Batu Utara	0.27	Cukup
24	Tapanuli Tengah	0.26	Cukup
25	Padang Lawas Utara	0.25	Cukup
26	Kota Binjai	0.25	Cukup
27	Serdang Bedagai	0.23	Cukup
28	Asahan	0.1	Kurang

Sumber: Data diolah (2025)

Kategori Baik diperoleh jika nilai IKK lebih besar dari 0,54 ($IKK > 0,54$) Kategori cukup jika IKK berada di antara 0,23 sampai dengan 0,54 . Kategori kurang jika IKK kurang dari 0,23. Kondisi keuangan provinsi Sumatera Utara rata-rata pada kategori cukup. Kategori baik terdapat di 4 kabupaten/kota. Sedangkan yang berada dalam kategori kurang hanya 1 kabupaten yaitu Asahan.

Pembahasan

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan solvabilitas layanan yang kuat, yang mencerminkan stabilitas fiskal dan kemampuan pengelolaan utang serta kewajiban secara lebih efisien. Hal ini dapat dikaitkan dengan struktur ekonomi Sumatera Utara yang lebih beragam, meliputi sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (Utara, 2024).

Tingkat fleksibilitas keuangan Provinsi Sumatera Utara yang tinggi karena proporsi belanja wajib (terutama belanja pegawai) terhadap total belanja lebih rendah. Hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja produktif dan penyesuaian program pembangunan (Mulyani, 2023). Kondisi ini sesuai dengan pandangan Mahmudi (2019) bahwa fleksibilitas keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengontrol struktur pengeluaran untuk mendukung efisiensi fiskal jangka panjang. Selanjutnya indeks kemandirian keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara

memiliki tingkat kemandirian fiskal yang baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang lebih besar di Sumatera Utara, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal (Sari, 2021)

Indeks Komposit Keuangan (IKK) merupakan ukuran agregat yang menggambarkan kesehatan keuangan daerah secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti kemampuan memenuhi kewajiban (solvabilitas), kemampuan beradaptasi terhadap perubahan fiskal (fleksibilitas), dan kemampuan membiayai pembangunan dari pendapatan sendiri (kemandirian) (Mahmudi, 2019). Dengan demikian, IKK menjadi indikator integratif untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efisien dan berkelanjutan (Halim, 2018).

Berdasarkan hasil pengelompokan Indeks Kondisi Keuangan (IKK), dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 4 kabupaten/kota dengan kategori baik, 27 kabupaten/kota dengan kategori cukup, dan 2 kabupaten/kota dengan kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Sumatera Utara masih berada pada tingkat kinerja keuangan sedang dan memerlukan penguatan pada aspek efisiensi belanja dan peningkatan PAD. Sumatera Utara cenderung memiliki kapasitas keuangan yang stabil, namun belum cukup kuat untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep kapasitas fiskal daerah dan kemandirian fiskal sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2018) dan Mahmudi (2019). Kapasitas fiskal mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai belanja publik tanpa ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan rasio-rasio yang digunakan pada penelitian ini, kondisi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan kesimpulan hanya ada satu kabupaten/kota memiliki kondisi keuangan yang kurang yaitu Asahan. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki kondisi cukup sebanyak 23 Kategori baik dimiliki oleh 4 kabupaten/kota (Medan, Pakphak Barat, Pematang Siantar dan Sibolga). Penelitian menggunakan 3 indeks dalam pengukuran kinerja keuangan suatu daerah, agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif disarankan untuk menambahkan pengukuran lainnya seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

REFERENSI

- A, H. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indonesia, R. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2014). Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 224. Jakarta: Republik Indonesia.
- Kurniawan, S. (2019). *Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah: Tantangan dan Peluang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mulyani, D. P. (2023). Fiscal Flexibility and Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *Journal of Regional Finance Studies*, 12-27.
- Nasution, A. (2022). Analisis Ketimpangan dan Struktur Ekonomi Sumatera Utrara. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia* , 112-126.

- R. Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara RI No. 284 Tahun 2020, Jakarta : Sekretariat Republik Indonesia, 2020.
- RI, B. P. (2023). *Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam Angka 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Sari, R. (2021). Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia. . *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah* , 120-133.
- SM, H. F. (2020). *Analisis Sumber Daya Alam dan Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soleh, A. &. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Utara, B. P. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*. Medan : BPS Sumatera Utara.